

DAFTAR BACAAN

Buku

- Ali, Z. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Amiruddin, A. & Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Asshiddiqie, J. & M. Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Sekretariat Jenderal Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006.
- Asshiddiqie, J. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006.
- Djajaatmadja, B.I. *Laporan Akhir Penyusunan Kerangka Ilmiah Perencanaan Pembangunan Hukum Tentang Harmonisasi Hukum Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Dalam kerangka Desentralisasi*. Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 2005.
- Fartini, A. & Istiqomah. *Dasar-Dasar Logika Penalaran Hukum*. Harva Creative, Bandung, 2025.
- Hadjon, P.M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. M2 Print, Surabaya, 2007.
- Hadjon, P.M. *Pengantar Hukum Administrasi*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011.
- Ibrahim, J. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing, Malang, 2006.
- Kelsen, H. *Pure Theory of Law*. University of California Press, Berkeley, 1967.
- Kelsen, H. *General Theory of Law and State*. Russel & Russel, New York, 1973.
- Mahfud MD, M. *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*. Pustaka LP3ES, Jakarta, 2006.
- Marzuki, P.M. *Penelitian Hukum*. Kencana, Jakarta, 2017.

Nawiasky, H. *Allgemeine Rechtslehre als System der rechtlichen Grundbegriffe*. Benziger, Einsiedeln, 1948.

Pusat Pengembangan Otonomi Daerah, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya & Badan Pengkajian MPR RI. *Kajian Akademik Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Badan Pengkajian MPR RI, Jakarta, 2018.

Radbruch, G. "Legal Philosophy" dalam John H. Wigmore, *et all (eds). The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*. Harvard University Press, Cambridge, 1950.

Rahardjo, S. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Reksodiputro, M. *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Bandung, 1997.

Ruiter, D.W.P. (2001). Legal Institutions. In: Legal Institutions. *Law and Philosophy Library*, 55. Springer, Dordrecht. https://doi.org/10.1007/978-94-015-9765-4_4

Suyanto, S. *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris, dan Gabungan*. UNIGRES PRESS, Gresik, 2022.

Jurnal

Aditya, Z.F. & Muhammad Reza Winata. "Rekonstruksi Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 9(1), 2018, pp. 79-100. <https://doi.org/10.22212/jnh.v9i1.976>

A.S., A.M.H., Yudhi Hertanto., Amiruddin Lannurung, Fatma Faisal, & Johannes Triestanto. "Fenomena Overlapping Regulasi Dalam Perspektif Hukum Tata Negara." *Jurnal Kolaboratif Sains*, 9(2), 2026, pp. 2269-2277. <https://doi.org/10.56338/jks.v9i2.7338>

Arifin, Z. & Adhi Putra Satria. "Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia: Antara Bentuk, Penyebab dan Solusi." *Jurnal Pro Hukum*, 9(1), 2020, pp. 1-10, <https://doi.org/10.55129/jph.v9i1.1016>

Athina, S. T., Purnama, E., & Efendi, E. (2022). "Dualisme Hukum Pendirian Perseroan Terbatas Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja." *Jurnal USM Law Review*, 5(2), pp. 466-477, <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.4989>

Christie, N. "Conflicts as Property," *The British Journal of Criminology*, 17(1), 1977, pp. 1–15. <https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.bjc.a046783>

Fattah, E.A. "Victimology: Past, Present and Future." *Criminologie*, 33(1), pp. 17-46. <https://doi.org/10.7202/004720ar>

Hastuti, E., Fence Wantu., & Lusiana Margareth Tijow. "Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan Melalui Mediasi." *Gorontalo Law Review*, 3(2), 2020, pp. 137-152.

Komarudin, K. & Abdullah Musthofa. "Disharmoni Antara Dispensasi Nikah Dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pemaksaan Perkawinan." *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies*, 8(3), 2025, pp. 717-725. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v8i3.1561>

Mendelsohn, B. "Victimology and Contemporary Society's Trends." *Victimology: An International Journal*, 1(1), 1976, pp. 8-28. <https://psycnet.apa.org/record/1978-20003-001>

Muhammad, H. "Implikasi Yuridis Pengaturan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 9(1), 2022, pp. 1–15. <https://doi.org/10.32493/SKD.v9i1.y2022.22495>

Murdani, B., et. al. "Disharmoni Pengaturan Dispensasi Kawin dan Konsekuensi Pidana Terhadap Pelaku Hubungan Seksual dengan Anak dalam Perkawinan." *Judge: Jurnal Hukum*, 6(5), 2025, pp. 1557-1563, <https://doi.org/10.54209/judge.v6i05.1930>

Murdiana, E. & Alendra Nauval Mufti Rayhan. "Reformasi Hukum Pidana Kekerasan Seksual Dari KUHP Ke Keadilan Korban." *Jurnal Supremasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 15(2), 2025, pp. 63-82, <https://doi.org/10.35457/supremasi.v15i2.4792>

Risal, M.C. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Penerapan dan Efektivitas." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 11(1), 2022, pp. 75-93, <https://doi.org/10.24252/ad.v1i2.34207>

Safudin, E. "Harmonisasi Hukum Dalam Antinomi Hukum (Analisis Terhadap Penerapan Pasal 20 Ayat 2 Huruf B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman)." *e-Journal Al-*

Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies, 2(2), 2020, pp. 201-229.
<https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v2i2.2592>

Shidarta, S. "Laws of Language and Legal Language: A Study of Legal Language in Some Indonesian Regulations," *Humaniora*, 8(1), (2017), pp. 97-104
<https://doi.org/10.21512/humaniora.v8i1.3700>

Slamet, K.G. "Harmonisasi Hukum dalam Perspektif Perundang-Undangan." *Jurnal Hukum*, 27(11), 2004, pp. 82-96.

Syach, A. A.P.A., Deine R. Ringkuangan., & Marhcel Reci Maramis. "Kekerasan Seksual oleh Pelaku Perkosaan yang Menyebabkan Korban Mengalami Kerusakan Fungsi Reproduksi Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022." *Lex Administratum*, 13(4), 2025, pp. 1-12.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/63115>

von Hentig, H. "Remarks on the Interaction of Perpetrator and Victim." *Journal of Criminal Law and Criminology*, 31(3), 1940, pp. 303-309.
<https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/jclc/vol31/iss3/7>

Tesis/Orasi Ilmiah

Gandhi, L.M. "Harmonisasi Hukum Menuju Hukum yang Responsif." *Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar*. Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, 1995.

Suhartono, S. "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara (Solusi Penyerapan Anggaran Belanja Negara Yang Efisien, Efektif, dan Akuntabel)." *Tesis*. Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, 2011.

Sayuna, I. "Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) Ditinjau Dari Otentisitas Akta Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris." *Tesis*. Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2016.

Media Daring

<https://kbbi.web.id/korban> diakses pada 2 Juni 2026.

<https://radargresik.jawapos.com/kota-gresik/83928691/sembilan-tahun-terakhir-angka-kekerasan-anak-capai-37-ribu-kasus> diakses pada 28 Mei 2026.

<https://www.unodc.org/pdf/rddb/CCPCJ/1985/A-RES-40-34.pdf> diakses pada 7 Mei 2026.

Arief Hidayat. Negara Hukum Berwatak Pancasila diakses dari https://www.mkri.id/public/content/infoumum/artikel/pdf/artikel_15_03_arief_hidayat.pdf pada 31 Mei 2026.

Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. “Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor PHN-HN.01.03-07.” Diakses dari https://bphn.go.id/data/documents/bphn_pedoman_evaluasi_puu_2020.pdf pada 1 Juni 2026.

“Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan.” <https://sultra.bpk.go.id/wp-content/uploads/2018/04/Sinkronisasi-Harmonisasi.pdf> diakses pada 5 Juni 2026.

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Penyelenggaraan Pelindungan Perempuan dan Anak. Diakses dari <https://share.google/3vHE71DfoXRR8ow8f> pada 28 Mei 2026.

UPT PPA Dinas KBPPA Gresik, “Standar Operasional Prosedur Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak”, UPT PPA Dinas KBPPA, Gresik, 2023.

Profil UPT PPA Gresik: Pelaksanaan Layanan terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Tahun 2025 dan 2026.

Infografis Data Pelaporan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2025.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.